

## **DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Dito Aditia Darma Nst<sup>1)</sup>, Erlina<sup>2)</sup>, Iskandar Muda<sup>3)</sup>, Idhar Yahya<sup>4)</sup>**

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara  
email: [ditoaditia@students.usu.ac.id](mailto:ditoaditia@students.usu.ac.id)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara  
email: [erlinaroesli@yahoo.co.id](mailto:erlinaroesli@yahoo.co.id)
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara  
email: [iskandar1@usu.ac.id](mailto:iskandar1@usu.ac.id)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara  
email: [idhar@usu.ac.id](mailto:idhar@usu.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to examine the impact of implementing government accounting standards on the quality of the financial statements of the North Sumatra Provincial Government. This study uses a descriptive quantitative approach, which explains in the form of tables and graphs the condition of objects and research results with the help of simple regression data analysis. The data used in this study is primary data and data collection is carried out through questionnaires to 40 respondents who are employees of the Regional Financial Management Unit who carry out the main tasks and functions of regional financial management in the North Sumatra Provincial Government. This research is expected to provide information regarding the impact of implementing government accounting standards on the quality of the financial statements of the North Sumatra Provincial Government. This research is also expected to be used as a reference in making decisions to improve the quality of financial reports in the North Sumatra Provincial Government and as a reference for further researchers to find factors that affect the quality of financial reports. Based on the results of the tests conducted, this study found that the implementation of government accounting standards had a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the North Sumatra Provincial Government. Through the analysis of determination, it was also found that the quality of financial statements can be explained by the implementation of government accounting standards by 80.4% and the remaining 19.6% can be explained by other variables outside the model studied.*

**Keywords:** *Implementing government accounting standards, the quality of the financial statements, North Sumatra Provincial Government*

### **1. PENDAHULUAN**

Pencapaian kinerja sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat dapat dilakukan melalui komunikasi dengan rakyat menggunakan komunikasi dua arah hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Sari & Putra (2012) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas korupsi dan berkinerja. Kondisi tersebut dapat diwujudkan dengan implementasi *good governance*. Untuk dapat mengimplementasikan *good governance* diperlukan indikator kunci yaitu transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas (Wisdom & Oyebisi, 2017). Dengan demikian, Pemerintah dalam mewujudkan *good governance* tersebut memerlukan suatu aturan tentang pengelolaan keuangan. Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana ruh dari peraturan perundang-undangan tersebut diturunkan ke daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara lebih teknis lagi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Aryawati & Sudana (2018) menyatakan bahwa reformasi pada pengelolaan keuangan telah menimbulkan perubahan dalam segala aspek sebagai bentuk dukungan agar perubahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Reformasi pengelolaan keuangan mengatur tentang akuntansi sector publik karena untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya dapat dilakukan melalui proses akuntansi tersebut. Begitu juga di Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan adanya suatu standard akuntansi pemerintahan yang mengatur. Wulandari & Nuryanto (2018) mengungkapkan bahwa adanya perubahan akuntansi pemerintahan yang awalnya pembukuan akuntansi pemerintah menggunakan pencatatan akuntansi tradisional berbasis kas dengan metode pencatatan *single entry* menuju pencatatan akuntansi modern dengan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas memiliki keuntungan yakni pencatatannya yang sederhana (Pangkong et al, 2013). Akan tetapi akuntansi berbasis kas ini juga memiliki kekurangan yaitu akuntansi berbasis kas dinilai kurang informatif. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan reformasi di dalam penerapan akuntansi pemerintahan. Hal ini diperlukan agar dapat memberikan laporan keuangan yang bersifat informatif. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan pencatatan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan setiap instansi pemerintah tanpa terkecuali, baik pemerintah pusat maupun daerah yang payung hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar ini diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan (Fajri et al, 2019). Namun beberapa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya instansi pemerintah daerah yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh auditor melalui pelaksanaan audit, baik audit internal maupun audit eksternal (Sriwijayanti, 2018). Salah satu Kabupaten yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang laporan keuangannya masih

terdapat beberapa temuan terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk beberapa elemen pengelolaan keuangannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta berdasarkan analisis dokumentasi terhadap laporan keuangan Pememrintah Provinsi Sumatera Utara yang disusun pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingganya tujuan kualitatif dari laporan keuangan dapat tercapai yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi penggunaannya sebagai pengambilan keputusan, untuk itu maka laporan keuangan wajib disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Untuk melihat kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan maka dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan tersebut, selama 4 tahun anggaran terakhir yaitu tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI. Namun masih ada beberapa temuan terkait dengan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan hasil audit ini masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan karena sistem pencatatan yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu piutang daerah yang tidak tertagih tapi belum dihapuskan dan investasi kemitraan dengan pihak ketiga belum

dilakukan likuidasi hal ini menggambarkan pencatatan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang belum berkualitas. Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang dijelaskan, maka dianggap perlu untuk dilakukan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji dampak implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. McNabb (2017) menyatakan bahwa jenis penelitian kuantitatif berdasarkan pada filsafat *positivisme* dalam metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan melakukan penjelasan dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek yang diteliti maupun hasil penelitian yang ditemukan (Ghozali, 2016). Metode kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis kuantitatif (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih oleh peneliti adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kriteria sebagai berikut: 1) Merupakan pegawai pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan 2) Pegawai pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang memahami laporan keuangan pemerintah daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 95 responden yang memahami atau memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *simple random sampling* sehingga populasi yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah berjumlah 40 responden dari jumlah seluruh populasi yang ada. Rincian jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

No	Bagian	Σ Responden
1	Bidang Pengelolaan	5

2	Anggaran Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	5
3	Bidang Akuntansi	15
4	Bidang Aset	
5	Sub Bagian Keuangan	5
6	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	10
Jumlah Sampel		

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 1) Observasi, yaitu mengamati dan meneliti secara langsung terhadap variabel yang menjadi sasaran penelitian; 2) Kuesioner, yaitu mendistribusikan daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan; dan 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan pada dua jenis, meliputi data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka hasil olahan yang dilakukan dan data kualitatif yaitu data bersifat deskriptif yang diharapkan dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini memperoleh data terkait dampak implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari pengolahan data jawaban responden atas butir-butir pernyataan kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Conrad et al (2014) menyatakan bahwa untuk menentukan nilai atau skor dari setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dapat menggunakan skala *likert*. Untuk menghitung nilai dari pada variabel X (implementasi standar akuntansi pemerintahan) dan variabel Y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) melalui cara mencari rata-rata (*mean*) variabel X (implementasi standar akuntansi pemerintahan). Rumus rata-rata (*mean*) yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$a. \bar{x} = \frac{\sum x_1}{n} \qquad b. \bar{y} = \frac{\sum y_1}{n}$$

Keterangan :

- $\bar{x}$  : Nilai rata-rata variabel x
- $\bar{y}$  : Nilai rata-rata variabel y
- $\Sigma$  : *Sigma*
- n : Jumlah sampel
- x1, x2 : Nilai i sampai dengan ke-n

Pemberian bobot dari jawaban yang diperoleh untuk setiap butir pernyataan dalam skala *likert* dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Bobot Pernyataan Kuesioner**

Kode	Pilihan Jawaban	Bobot
SD	Seluruhnya diterapkan	5
SBD	Sebagian besar diterapkan	4
KKD	Kadang-kadang diterapkan	3
SKD	Sebagian kecil diterapkan	2
TPD	Tidak pernah diterapkan	1

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Untuk pengujian hipotesis tentang ada atau tidaknya dampak antara penerapan implementasi standar akuntansi pemerintahan (variabel X) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (variabel Y), digunakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho :  $\rho = 0$ , Tidak berpengaruh positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Ha :  $\rho \neq 0$ , Berpengaruh Positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk menguji hipotesis di atas dilakukan pengujian dengan cara sebagai berikut :

$$F = \frac{JK \text{ Regresi}}{JK \text{ Residu}}$$

Kriteria pengujian :

Menolak Ho jika F hitung > F  $\{\alpha; (k, n-k-1)\}$  atau  $\rho\text{-value} \leq \alpha$ . Menerima Ho jika sebaliknya.

Untuk menganalisis kuat lemahnya dampak antar variabel dapat di klasifikasikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

**Tabel 3. Tingkat Keeratan Korelasi**

Koefisien Korekasi	Keeratan Korelasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai intrumen pengumpulan data, sehingga instrumen ini harus diuji validitas (keabsahan) dan realibilitas (kehandalan). Untuk itu perlu dilakukan uji *validitas* dan *reliabilitas* sehingga data sudah siap untuk diolah. Para responden penelitian merupakan responden yang berasal dari pegawai pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pegawai pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang memahami laporan keuangan pemerintah daerah dan implementasi standar akuntansi pemerintahan. Jumlah responden untuk uji *validitas* dan uji *reliabilitas* dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang. Berikut adalah hasil pengujian *validitas* dan *reliabilitas* untuk variabel X dan Y.

Uji *validitas* ini perlu dilakukan dengan skor masing-masing butir pertanyaan dikorelasikan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan, alat ukur yang digunakan mempunyai *validitas* bila korelasi tersebut signifikan, sehingga bisa diartikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat untuk mengukur yang hendak diukur (Yusuf, 2014). Dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 40 orang, maka angka kritis dari r tabel yang didapat adalah sebesar 0,304 jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r tabel maka butir pernyataan dikatakan *valid*. Berdasarkan pengujian *validitas* variabel X (implementasi standar akuntansi pemerintahan) yang telah dilakukan ternyata pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan *valid* dengan nilai terendah sebesar 0.337 adalah butir pernyataan nomor 13 yaitu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan butir

pernyataan yang memiliki nilai tertinggi adalah sebesar 0,583 yaitu butir pernyataan nomor 18 yang menyatakan laporan keuangan konsolidasi telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil perhitungan nilai korelasi antara *item total* variabel X menunjukkan untuk seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari pada nilai r tabel yaitu 0.304. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pernyataan variabel X *valid* dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Hasil uji validitas variabel Y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) menunjukkan pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dengan nilai terendah sebesar 0.457 adalah butir pernyataan nomor 7 yaitu laporan keuangan pada setiap entitas pelaporan selalu dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan butir pernyataan yang memiliki nilai teratas sebesar 0.758 adalah item pernyataan nomor 8 yakni laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh pegawai yang memiliki pengetahuan yang memadai terkait implementasi standar akuntansi pemerintahan. Hasil perhitungan nilai korelasi *antara item total variable* Y menunjukkan untuk seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.304. Nilai ini mengindikasikan semua pernyataan variabel Y *valid* dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji *reliabilitas* merupakan pengujian terhadap butir pernyataan pada instrumen penelitian. *Reliabilitas* menunjukkan adanya konsistensi pada alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian *realibilitas* pada penelitian ini hanya dilakukan terhadap 40 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai *alpha*, jika nilai *alpha* sama dengan atau melebihi 0,60 maka pernyataan variabel tersebut dikatakan *reliabel* begitupun sebaliknya apabila nilai *alpha* kurang dari 0.60 maka pernyataan variabel tersebut tidak *reliabel* (Lubis, 2015). Hasil dari pengujian *reliabilitas* dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Pilihan Jawaban	Bobot
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan	0,7678	Reliabel

(X)		
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,7067	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah *reliabel* karena nilai *alpha cronbach* yang dihasilkan dari variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Hal ini dapat dikatakan bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan terkait dampak implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui analisis regresi ditemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari koefisien *regresi* yang bernilai positif dan setiap kenaikan variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan sebesar satu satuan maka akan memberikan pengaruh sebesar 0,301 dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini sejalan dengan penelitian Harahap (2018) yaitu Efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa, implementasi standar akuntansi pemerintahan yang berjalan dengan baik dan efektif akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana seluruh instansi pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat

memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Syarat utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah harus memenuhi syarat kualitatif laporan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Windrastuti et al, 2013). Dalam rangka memenuhi syarat kualitatif atas laporan keuangan pemerintah daerah maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah wajib berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sehingga diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diperoleh koefisien determinasi  $KD = r^2 \times 100\%$  adalah sebesar 0,804. Artinya sebesar 80,4% dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya sebesar 19,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti pada penelitian ini.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistik ditemukan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dijelaskan pada koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikansi yang ditemukan dan dapat dijelaskan juga bahwa setiap kenaikan variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan sebesar satu satuan maka akan memberikan pengaruh sebesar 0,301 dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian analisis koefisien determinasi menemukan bahwa sebesar 80,4% dari variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) dapat dijelaskan oleh variabel independen (implementasi standar akuntansi pemerintahan) sedangkan sisanya sebesar 19,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti pada penelitian ini, antara lain : kualitas SDM, pengalaman,

komitmen instansi, pendampingan, sistem pengendalian intern pemerintah, efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi, dan lain sebagainya.

#### 5. REFERENSI

- Aryawati, N. P. A., & Sudana, I. P. (2018). Financial Performance Mediates Equity Fund, Regional Allocation On Human Development Index And Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 28–41. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p04>
- Conrad, C., Serlin, R., & Harwell, M. (2014). Research Design in Qualitative Quantitative/Mixed Methods. In *The SAGE Handbook for Research in Education: Pursuing Ideas as the Keystone of Exemplary Inquiry*.
- Fajri, R. N., Djumali, & Hartono, S. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang). *Jurnal Balance*, XVI(1), 64–83.
- Ghozali, I. (2016). Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. In *Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002812>
- Harahap, I. A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijunggang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–54.
- Lubis, A. F. (2015). Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis. In *USU Press* (Volume I). Medan.
- McNabb, D. E. (2017). Fundamentals of Quantitative Research. In *Research Methods for Public Administration and Nonprofit Management* (Fourth edi, pp. 111–121). <https://doi.org/10.4324/9781315181158-9>

- Pangkong, T. C., Saerang, D. P. ., & Sondakh, J. J. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 4(1).
- Sari, D. ., & Putra, H. . (2012). Menelidik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen (JEAM)*.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1), 89–101.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *cv Alfabeta*.
- Windrastuti, I., Adisasmita, H. ., & Damayanti, R. . (2013). *Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Hasanuddin.
- Wisdom, O., & Oyebisi, O. M. (2017). Impact of Public Sector Auditing in Promoting Accountability and Trasparency in Nigeria. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 22(3), 1–8.
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). The Effect Of Internal Control, Anti-Fraud Awareness, Integrity, Independence, And Profesionalism To Fraud Prevention. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117–125. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In *KENCANA*. [https://doi.org/10.1016/S0257-8972\(02\)00060-9](https://doi.org/10.1016/S0257-8972(02)00060-9)